



Peranan Bank Dunia terhadap Liberalisasi Pendidikan di Indonesia

Emmy Yunita Aruan* & Indra Kesuma Nasution

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima Maret 2017; Disetujui Mei 2017; Dipublikasikan Juli 2017

Abstrak

Indonesia sampai sekarang masih mengalami penjajahan, hanya saja bentuk penjajahannya yang berbeda. Kalau dahulu kita di jajah secara fisik atau dengan kekerasan tetapi saat ini penjajahan dilakukan dengan menggunakan cara yang lebih halus yakni penjajahan melalui perekonomian, budaya, pendidikan, teknologi dan sebagainya atau dengan kata lain penjajahan ini disebut sebagai neo liberalisme. Indonesia adalah salah satu sasaran dari negara-negara maju untuk dijajah dengan menggunakan metode penjajahan model baru tersebut. Beberapa pakar pendidikan berpendapat bahwa perubahan status Perguruan Tinggi Negeri menjadi BHMN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia adalah bukti penjajahan model baru di dunia pendidikan. Liberalisasi pendidikan adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam memperbaiki keadaan pendidikan di Indonesia yang merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh Bank Dunia agar Indonesia memperoleh pinjaman yang dapat menarik para pemegang modal menanamkan modalnya sehingga biaya pendidikan menjadi naik. Peran Bank Dunia disini selain memberikan dana pinjaman juga memberikan perubahan pendidikan di Indonesia. Cara ini tidak efektif dalam meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan sangatlah penting, terutama dalam hal memperbaiki kehidupan untuk menjadi lebih baik agar bisa menghadapi gejolak perkembangan zaman yang semakin maju.

Kata Kunci: Kebijakan, Liberalisasi, Pendidikan

Abstract

Indonesia is still experiencing colonialism, it's just a different form of colonization. In the past, we did it with violence or now colonialism is done using a better method of colonialism through economy, culture, education, technology, etc. or in other words, colonialism is called neo liberalism. Indonesia is one of the goals of developed countries to be colonized by using the colonization method of the new model. Some education experts organized by State Universities to become BHMNs carried out by the Government of Indonesia are proof of the colonization of new models in the world of education. Education liberalization is one of the government's policies to improve the education state in Indonesia which is one of the conditions proposed by the World Bank so that Indonesia can be used to help people to develop modalities for increased costs. The role of the World Bank here is to provide loan funds for education in Indonesia. This method is not effective in improving the education system in Indonesia because there are still many people who cannot afford it. This should be the government's attention, because as we do for education, especially in terms of improving lives to be better in order to deal with the turbulence of the development of an increasingly advanced era.

Keyword: Education, Liberalization, Policy

How to cite: Aruan, E.Y. & Nasution, I.K. (2017), Peranan Bank Dunia terhadap Liberalisasi Pendidikan di Indonesia, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 9, (2): 75-84

*Corresponding author:

E-mail: julitasitumorangusu@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu cara pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah usaha untuk membina kepribadian dan kemampuan manusia baik kemampuan jasmani dan rohani yang dilakukan dalam rumah tangga, sekolah dan dalam masyarakat agar dengan kemampuan dapat mempertahankan dan mengembangkan hidup dan kelangsungan hidup masyarakat. (Abdullah, 1987).

Potret dunia pendidikan di Indonesia mengalami berbagai masalah. Ada penyebab yang lebih mendasar atas belum terpenuhinya hak-hak pendidikan masyarakat. Penyebabnya adalah tiga masalah yang sampai saat ini masih terus menjadi virus yang merusak masyarakat, yakni utang luar negeri, korupsi yang merajalela, dan inefisiensi. Karena beban pembayaran utang begitu tinggi, maka dampak yang paling terasa oleh masyarakat saat ini adalah pengurangan subsidi untuk berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, dan sebagainya. Akibatnya, biaya pendidikan naik. Beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka berubah status menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara), eufemisme bagi privatisasi, yang intinya membuat pendidikan kemudian berbiaya mahal. Dengan dukungan ketentuan hukum yang menjadi payung legitimasi atas proses ini, masyarakat menjadi lemah untuk menuntut tanggung jawab negara atas penyediaan sarana pendidikan yang dapat dijangkau.

Jelas terlihat bahwa karena Pinjaman Luar Negeri pada dasarnya adalah sebuah mekanisme kolonialisme, maka Pinjaman Luar Negeri yang sangat besar yang dimiliki Indonesia, tidak hanya menyebabkan timbulnya

ketergantungan utang, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Proses pendidikan di Indonesia pun patut diwaspadai telah berubah fungsi dan proses “pencerdasan kehidupan bangsa” menjadi kaderisasi agen-agen neokolonialisme. Pembayaran angsuran pokok dan bunga utang berlipat kali lebih besar dari belanja pendidikan, maka tidak berlebihan bila Pinjaman dinyatakan sebagai penyebab utama lemahnya komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Bagi penulis membahas tentang Peranan Pinjaman Luar Negeri Terhadap Liberalisasi Pendidikan di Indonesia adalah sesuatu yang menarik. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peranan Pinjaman Luar Negeri. Tanpa kehadiran sumber pendanaan eksternal tersebut, sulit rasanya membayangkan Indonesia bisa mencapai kinerja yang baik. Demikian juga tanpa adanya Bantuan Luar Negeri rasanya Indonesia akan sangat sulit membiayai berbagai macam proyek dan program yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif terhadap penurunan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan peningkatan pendidikan tentunya. (Tambunan, 2008). Dimana yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengapa pemerintah membiayai pembangunannya di sektor pendidikan dengan Pinjaman Luar Negeri tidak menjadi lebih baik, tetapi justru mengalami kebangkrutan, karena beban Pinjaman dalam bentuk pembayaran Pinjaman plus bunga menjadi sangat berat sehingga dibebankan dengan biaya pendidikan yang semakin mahal. (Tambunan, 2008).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode yang dipakai, penelitian ini menggunakan metode

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan dan kemudian dianalisa. Tapi penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan tetapi juga memadukan (analisis).

Menurut Whitney, Metode deskriptif adalah pencarian fakta interpretasi yang tepat. Yang digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. (Nazir, 1988)

Dengan metode deskriptif ini akan mampu melihat kedudukan (status) dari permasalahan yang diteliti serta melihat hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain.

Untuk mengumpulkan data atau informasi, keterangan-keterangan fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada literatur, buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, artikel, undang-undang, peraturan-peraturan dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang didapat dari studi pustaka ini adalah data yang sifatnya teoritis dan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisisnya. Teknik untuk

menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis ini dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif ini dapat berupa ucapan atau perilaku yang diamati orang-orang. Kemudian menyusun data yang telah ada untuk kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih pada upaya mencari pemahaman (*understanding*). (Moleong, 1990) Setelah dianalisis, maka ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Bank Dunia Terhadap Liberalisasi Pendidikan di Indonesia

Keanggotaan Indonesia pada International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) dan pada International Monetary Fund (IMF) dimulai dengan diajukannya permohonan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) pada pihak IMF dan IBRD pada tanggal 24 Juli 1950. Berdasarkan surat permohonan tersebut kemudian diadakan serangkaian pembicaraan, penelitian dan pertimbangan guna menentukan dapat atau tidaknya Indonesia menjadi anggota pada IMF dan IBRD.

Pada tanggal 10 September 1952 Dewan Gubernur IMF dan Dewan Gubernur IBRD dalam sidang tahunannya di Mexico city menyetujui resolusi-resolusi yang memuat peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemerintahan RI agar dapat diperkenankan menjadi anggota IMF dan IBRD. Resolusi yang dikeluarkan IMF adalah resolusi nomor 7-9 sedangkan resolusi yang dikeluarkan IBRD adalah resolusi nomor 73.

Setelah pemerintah RI telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam resolusi pada tahun 1953, pada tanggal 13 Januari 1954 keanggotaan Indonesia pada IMF dan IBRD disahkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD).

Selanjutnya pada tahun 1960 situasi politik luar negeri Indonesia berada pada suasana yang tidak menentu dan tidak menguntungkan. Hal ini kemudian terlihat dalam politik luar negeri dan hubungan Internasional, dimana Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan politik poros Jakarta - Peking - Moskow yang diambil oleh pemerintah pada saat itu dan disusul dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Sebagai akibat Indonesia keluar dari PBB maka Indonesia tidak lagi dicantumkan sebagai daftar anggota PBB, termasuk untuk kegiatan dalam badan-badan khusus PBB. Berdasarkan keadaan tersebut maka pemerintah RI mengajukan surat penarikan diri dari keanggotaan IMF dan IBRD.

Penarikan diri dari keanggotaan Indonesia dari IBRD memang dimungkinkan, karena pada AoA IBRD terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penarikan diri keanggotaan dari suatu negara. Ketentuan itu diatur dalam Pasal VI AoA IBRD yang menyatakan bahwa "any member may withdraw from the Bank at any time by transmitting of notice in writing to the Bank at its principal office. Withdrawal shall become effective on the date such notice is received". (*IBRD, Article of Agreement* (Washington D.C, 1989)

Dalam Piagam PBB tidak terdapat atau memuat ketentuan mengenai

masalah penarikan diri keanggotaan suatu negara. (Suryokusumo, 1990) Berhubung tidak adanya peraturan tersebut maka penarikan diri Indonesia dari PBB tidak dianggap sebagai penarikan diri atau penghentian keanggotaan Indonesia pada PBB, melainkan suatu penghentian kerjasama Indonesia dengan PBB.

Keadaan ini tidak berlangsung lama karena setelah terbentuknya pemerintahan baru pada Tahun 1967 di Indonesia Pemerintah RI berupaya memulihkan kembali kondisi politik dalam negeri. Serta mengupayakan rehabilitasi ini adalah dengan memulihkan kembali hubungan luar negeri Indonesia. Wujud dari upaya rehabilitasi ini adalah dengan memulihkan kembali hubungan luar negerinya terutama pada PBB dan badan-badan khusus PBB.

Melalui Duta Besarnya untuk Amerika Serikat pemerintah RI mengirimkan telegram kepada Sekertaris Jendral besar PBB tanggal 16 September 1966 yang intinya memberitahukan bahwa pemerintah RI akan merintis kembali kerjasamanya dengan PBB. Dengan diterimanya kembali Indonesia dalam PBB maka Indonesia juga mengajukan kembali permohonan keanggotaan kepada IMF dan IBRD. Permohonan tersebut kemudian dibahas dalam sidang tahunan IMF dan IBRD pada tanggal 30 September 1966. Dalam sidang itu diputuskan untuk menerima kembali keanggotaan Indonesia pada IMF dan IBRD dalam *Undang-Undang Tentang Keanggotaan Kembali RI Dalam Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) No.9 Tahun 1966, LN. No.36 Tahun 1966.*

Pemerintah RI kemudian pada tanggal 8 November 1966 mengesahkan

keanggotaan kembali Indonesia itu dengan UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali RI dalam Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD).

Sehubungan dengan pemberitahuan dari Mr. Schwitzer Direktur pelaksana IMF, tertanggal 16 September 1966 tentang perubahan Resolusi IMF No.9 menjadi No.21-12 dan Resolusi IBRD No.7 menjadi No.223, yang semuanya mengatur tentang keanggotaan Indonesia, maka perlu diadakan perubahan Pasal 2 dari UU No.9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam IMF dan IBRD. Perubahan ini disahkan oleh pemerintahan RI pada tanggal 10 Januari 1967 dengan UU No.2 tahun 1967 tentang perubahan UU No.9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali RI dalam IMF dan IBRD (Lembaran Negara Tahun 1966 No.36). Perubahan ini hanya bersifat teknis-administratif saja dan sama sekali tidak mengubah materi undang-undang itu.

Masalah Keanggotaan IMF dan IBRD sebagaimana diatur dengan UU No.9 Tahun 1966, UU No.2 tahun 1967 tersebut pelaksanaannya diatur dalam dua perangkat hukum sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 tahun 1966 Keanggotaan Kembali RI dalam IMF dan IBRD. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No. 1 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.9 tahun 1966 (LN tahun 1966 No.36) tentang Keanggotaan Kembali RI dalam IMF dan IBRD.

Peranan Bank Dunia Dalam Memberikan Dana Pinjaman

Hal paling mendasar yang membedakan peranan Bank Dunia

(*World Bank*) dan lembaga keuangan Internasional lainnya dengan pemerintah negara kreditur adalah dalam hal kontroversi andil mereka terhadap terciptanya "perangkap utang" dan sejumlah "keterpaksaan" lain yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang dilihat dari perspektif jenis pinjamannya. Utang luar negeri tidak begitu menimbulkan kontroversi manakala pinjaman yang diberikan ke negara berkembang adalah pinjaman bilateral. Oleh karena, dengan jenis pinjaman seperti ini, sangat jarang pemerintah yang meminjamkan dananya ikut serta dalam melakukan intervensi terhadap pengelolaan dan kebijaksanaan ekonomi dalam negeri negara peminjam.

Dilihat dari fungsinya, sebenarnya Bank Dunia mempunyai tugas yang sama seperti halnya bank sentral lainnya. Salah satu fungsi utama dari Bank Dunia adalah membantu memelihara stabilitas kurs devisa negara-negara anggotanya, sehingga peran Bank Dunia adalah sebagai "juru selamat" bagi Bank Sentral negara anggotanya yang mengalami kesulitan dalam likuiditas Internasional. Imbalan yang seringkali diminta oleh lembaga ini adalah tidak saja dari segi ekonomi, namun yang justru paling menonjol adalah masalah non ekonomi, yang berkaitan dengan melakukan restrukturisasi perekonomian domestik untuk mengarah pada mekanisme pasar dan menghapuskan segala inefisiensi dan distorsi ekonomi yang ada di dalam perekonomian nasional. Di samping itu, pemberian pinjaman belakangan ini dikaitkan pula dengan masalah pembasmian korupsi dan mengikis penyelewengan dalam pengelolaan bantuan. Dalam kehadiran Bank Dunia sebagai "dewa penyelamat" bagi

Indonesia sebenarnya menimbulkan pro-kontra dan kontroversi. Keinginan untuk tidak mau didikte pihak lain dan mempertahankan kedaulatan ekonomi dengan pilihan akan nasib perekonomian Indonesia selanjutnya sempat menjadi semacam dilema yang begitu besar bagi pemerintah. Sebenarnya, kehadiran IMF dan Bank Dunia berkaitan erat dengan tujuan shock therapy yang dapat memberikan tekanan pada pasar valuta asing, sekaligus merupakan bantuan jangka panjang untuk pembenahan sektor rill. Pencairan dana dari IMF dan Bank Dunia dalam jangka pendek merupakan tameng dalam rangka melindungi jatuhnya nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat di pasar valuta asing. Sementara dalam jangka panjang bantuan kedua lembaga ini diharapkan untuk mengisi pundi-pundi kas negara. Di samping itu keterlibatan lembaga ini semakin memberikan jaminan kepercayaan pada pihak kreditur lain dalam rangka penyelesaian utang luar negeri, dalam Undang-Undang Tentang Keanggotaan Kembali RI Dalam Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) No.9 Tahun 1966, LN. No.36 Tahun 1966.

Berikut adalah beberapa peranan Bank Dunia dalam Pendidikan di Indonesia: Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), telah menyediakan hibah untuk setiap siswa ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sejak tahun 2005. BOS merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas kepada semua siswa di seluruh tingkatan pendidikan. Bank Dunia mendukung program BOS melalui program BOS KITA (Bantuan Operasional Sekolah - Perbaikan

Pengetahuan untuk Transparansi dan Akuntabilitas), program yang bertujuan mempermudah akses ke pendidikan bermutu untuk semua anak usia 7 hingga 15 dengan memperkuat komite sekolah, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan pengaturan fidusia demi transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas program BOS sehingga dana BOS sampai saat sekarang ini masih dapat dipergunakan dengan lebih baik lagi. Kedutaan Besar Kerajaan Belanda menyediakan dukungan tambahan sebesar \$20 juta (sekitar 200 miliar Rupiah) yang bertujuan untuk membantu Departemen Pendidikan Nasional dalam memaksimalkan efektivitas Program BOS. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat sejumlah kegiatan: pengawasan, evaluasi dan penanganan keluhan; kampanye informasi dan pemasaran sosial; sekaligus memperkuat tim BOS yang ada di tingkat sekolah serta upaya komite sekolah dan orang tua.

Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU)

Proyek BERMUTU berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pengajaran. BERMUTU berarti "berkualitas" dalam Bahasa Indonesia. Proyek ini akan mempersiapkan kerangka kerja untuk memastikan bahwa guru memiliki peluang untuk meningkatkan pengetahuan mereka atas mata pelajaran yang mereka ajarkan, dan pada saat yang sama meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Proyek ini pun berusaha meningkatkan sistem akreditasi untuk program pendidikan guru.

Proyek ini akan berjalan dalam beberapa cara, melalui pendidikan guru berbasis perguruan tinggi, melalui

program pengembangan guru tingkat lokal, dan melalui penemuan cara untuk meningkatkan sistem insentif dan pertanggungjawaban guru. BERMUTU akan berjalan secara langsung di perguruan-perguruan tinggi terpilih yang memiliki program pelatihan guru, yang menyediakan hibah dengan basis kompetitif untuk mendorong mereka dalam meningkatkan status akreditasi dan meningkatkan program penjangkauan mereka untuk melatih guru di wilayah pedesaan dan terpencil, terutama melalui metode berbasis TI. Proyek ini akan bekerja bersama kelompok guru, kepala sekolah dan pengawas di 16 provinsi dan 75 kabupaten/kota, dengan menyediakan peluang bagi para guru di wilayah pedesaan dan terpencil untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui pembelajaran jarak jauh.

Early Childhood Education and Development (ECED)

Proyek ECED bekerja sama dengan Departemen Pendidikan untuk memastikan bahwa semakin banyak anak-anak dari keluarga miskin yang memiliki akses terhadap pendidikan, sehingga meningkatkan perkembangan dan persiapan mereka untuk pendidikan selanjutnya, sekaligus mengembangkan sistem ECED yang berkualitas secara berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan ini, proyek berupaya untuk: Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin agar terlibat dalam perencanaan partisipatif yang akan menghasilkan layanan ECED baru atau yang ditingkatkan untuk anak-anak dan keluarga mereka, yang akan menyertakan dukungan atas status nutrisi dan kesehatan mereka. Mempersiapkan dasar untuk sistem ECED berkesinambungan melalui komitmen anggaran dari kabupaten

yang berpartisipasi, pembangunan kapasitas kabupaten, serta pembentukan jaminan kualitas nasional dan sistem pembangunan profesional. Memastikan peningkatan berkelanjutan atas penyampaian layanan dan pembangunan sistem melalui pengelolaan proyek yang efektif, serta pengawasan dan evaluasi.

Proyek ini menargetkan sekitar 738.000 anak-anak usia 0-6 yang tinggal di sekitar 6.000 masyarakat miskin yang berlokasi di 3.000 desa di 50 kabupaten miskin di Indonesia. Setelah jelas bahwa pendekatan ini berjalan, Pemerintah akan mulai memperluas program ke lebih banyak anak-anak miskin di seluruh negeri.

Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE)

IMHERE dimulai dengan Rencana Jangka Panjang Pendidikan Tinggi Pemerintah, yang mendukung pengelolaan dan administrasi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Departemen Pendidikan Nasional, serta membantu pengembangan kerangka kerja hukum untuk pendidikan tinggi. IMHERE bertujuan untuk membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan perguruan tinggi negeri menjadi semakin otonomi dan lebih andal, sambil meningkatkan kualitas, relevansi, efisiensi dan kesamaan pendidikan bagi siswa. IMHERE mendanai pengembangan program akreditasi kelembagaan, BAN-PT, strategi untuk memulihkan Universitas Terbuka serta memperkuat pengelolaan dan administrasi perguruan tinggi.

Komponen proyek telah dirancang untuk: Memfasilitasi reformasi dan pengawasan sistem Pendidikan Tinggi; Menyediakan hibah untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan kualitas akademis; Merevitalisasi

universitas negeri dan terbuka di bidang pemerintahan, keuangan, penjangkauan, muatan, dan penyampaian.

Dana Perwalian Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (BEC-TF)

BEC-TF bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dan Tujuan Pendidikan untuk Semua dengan mendukung pemerintahan yang baik dalam pendidikan. BEC-TF akan melakukannya dengan bekerja bersama pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan cara keuangan dan informasi dikelola, sehingga dana dan informasi masuk ke sistem secara lebih efisien dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik di semua tingkat dalam sistem yang terdesentralisasi ini. BEC-TF akan bekerja bersama pemerintah daerah, kantor pendidikan, DPRD, dewan pendidikan, serta perwakilan komite sekolah dan kepala sekolah yang akan mendapatkan peningkatan akses ke informasi yang mereka butuhkan agar dapat melakukan tugas mereka dengan lebih baik, serta pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan informasi ini dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan penyampaian layanan pendidikan.

Didanai oleh Pemerintah Belanda (EUR 22 juta) dan Komisi Eropa (EUR 17 juta), program ini dikelola oleh Bank Dunia dan telah dimulai sejak 2007-12. Program ini bertujuan untuk mendukung agenda Reformasi Pendidikan Pemerintah Indonesia serta mempersiapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi untuk program investasi sektoral besar mulai dari tahun 2009.

BEC-TF berfokus pada tiga area utama, yang menggunakan kombinasi bantuan teknis, pelatihan, dan hibah

untuk pemerintah daerah: Mendukung forum Dialog Pendidikan Tematis yang dipimpin Pemerintah untuk melakukan analisis kebijakan, terlibat dalam dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan dan mitra pembangunan, serta melakukan pengawasan atas sektor pendidikan secara keseluruhan; Meningkatkan pemerintahan dan penggunaan sumber daya yang efisien melalui peningkatan transparansi, pertanggungjawaban, peningkatan proses anggaran dan pembiayaan berbasis kinerja, peningkatan pengelolaan dan akuntansi keuangan, terutama di pemerintah daerah; Memperkuat kapasitas sistem penilaian informasi dan kinerja yang ada, sehingga informasi yang lebih baik dan lebih tepat waktu dapat digunakan oleh pemangku kepentingan di semua tingkat.

Program Dukungan Pendidikan Belanda (DESP) 2006-2011

Didanai Pemerintah Belanda, DESP merupakan Dana Perwalian yang tersedia bagi Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kebijakan dan program yang akan memungkinkannya mencapai tujuan utama rencana strategis pendidikan (RENSTRA), yaitu, Meningkatkan akses atas pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat miskin; Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan bagi para guru; Meningkatkan pemerintahan dan penyampaian layanan, terutama dalam konteks desentralisasi

Melalui Dana Perwalian ini, Bank Dunia akan melakukan serangkaian penelitian untuk memeriksa cara meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan guru yang efektif; cara meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(ICT) di sekolah-sekolah; cara meningkatkan pemerintahan, pertanggungjawaban dan kapasitas di tingkat kabupaten; cara memperkuat sekolah dan masyarakat sehingga mereka dapat membantu dalam penyampaian layanan pendidikan; cara meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan evaluasi untuk program pendidikan.

Di tahun 2008, \$20 juta ditambahkan ke dana perwalian untuk melakukan kegiatan yang dirancang untuk mendukung program BOS-KITA. Kegiatan utama mencakup: Pengawasan mandiri; Pengembangan mekanisme penanganan keluhan; Pengembangan kapasitas untuk pengawasan dan evaluasi; Studi mengenai kampanye informasi dan pemasaran sosial; Studi pengelolaan berdasarkan sekolah; Pelatihan tingkat nasional untuk sekolah, komite sekolah dan masyarakat mengenai BOS dan pengelolaan berdasarkan sekolah.

SIMPULAN

Pendidikan adalah salah satu sarana dalam menciptakan generasi-generasi yang bias membawa perubahan di masa yang akan datang. Yang tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa baik secara jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaannya. Perlu kita sadari bahwa pendidikan mempunyai tiga tugas pokok yakni: mempreservasi, mentransfer, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Oleh karena itu pendidikan begitu penting pada era globalisasi ini dimana dengan perubahan yang begitu cepat dan kompleks yang terjadi terus menerus melalui proses globalisasi yang membawa dampak yang amat dalam terhadap proses pendidikan. Dampak

dari perubahan ini menuntut adanya perubahan pola dalam pendidikan sehingga pendidikan tidak kehilangan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Perubahan yang diperlukan dalam pendidikan ini menuntut paradigma baru yang dapat member arah dan landasan yang lebih sesuai dan tepat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional untuk memberikan respon yang tepat terhadap berbagai tantangan termasuk tantangan yang bersifat global. Seperti kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan UU BHP yang menimbulkan banyak kontroversi diberbagai kalangan. Adanya liberalisasi pendidikan melibatkan berbagai pihak termasuk Bank Dunia (World Bank), dimana selain memberikan dana pinjaman, Bank Dunia juga memberikan masukan bagi masalah pendidikan yang ada di Indonesia yang masih belum mengalami kemajuan dibandingkan Negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1987). *Agama Dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rajawali.
- Arifin, S. (1992). *Metode Penulisan Karya Ilmiah, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera*.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. (1996). *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Budiardjo, M. (1992). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Utama.
- <http://www.kabarindonesia.com/berita.php>
- Kusmanto, H. dkk. (2006). *Pengantar Ilmu Politik*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Lubis, M.S. (1981). *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni.

- Moleong, J.L. (1990), *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Karya, 1990.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prihatmoko, J.J. (2007). *Mendemokratisasikan Pemilu Dari Sistem Sampai Eleman Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Santoso, T. & Supriyanto, D. (2004). *Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sitepu, A.P. (2006). *Sistem Politik Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi Dan Demokratisasi*, Alih Bahasa I. Made Krisna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Soryokusumo, S. (1990). *Hukum Organisasi Internasional*, cet I, Jakarta: UI-Press
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kelima, Bandung: Alfabeta.
- Sunny, I. (1980). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru.
- Tambunan, T.T.H. (2008). *Pembangunan Ekonomi Dan Utang Luar Negeri*, Jakarta: Rajawali Pers.
- UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD Prop, DPRD Kab./Kota.
- UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Wahidin, S. (2003). *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- www.wikipedia/sejarah-demokrasi.com